

# ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KETERLAMBATAN DAYA SERAP ANGGARAN (Studi Empiris Pada SKPD Pemprov NTB)

Ahmad Rifai<sup>1</sup>

Biana Adha Inapty<sup>2</sup>

Rr. Sri Pancawati M<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram  
e-mail : bianainapty@hotmail.com

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah perencanaan, regulasi, koordinasi, pelaksanaan, desentralisasi dan sumber daya manusia merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi terlambatnya daya serap anggaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* yaitu aparatur yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran dan aparatur yang terlibat dalam proses penatausahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda untuk menganalisis pengaruh variabel perencanaan, regulasi, koordinasi, pelaksanaan, desentralisasi dan sumber daya manusia pada daya serap anggaran. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perencanaan, regulasi, pelaksanaan, desentralisasi, koordinasi dan sumber daya manusia tidak berpengaruh pada keterlambatan daya serap anggaran. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas cakupan sampel dan memperbaiki indikator variabel yang digunakan terutama untuk perencanaan terkait permasalahan penganggaran.

**Kata kunci:** Daya serap anggaran, perencanaan, regulasi, koordinasi, pelaksanaan

## ABSTRACT

*The purpose of this study to determine whether the planning, regulation, coordination, implementation, decentralization and human resources are all factors that influence delays in budget absorption. This type of research is a survey research with purposive sampling technique that personnel involved in the budgeting process and apparatus that are involved in the process of administration. The analysis technique used is multiple linear regression analysis to analyze the variables influence the planning, regulation, coordination, implementation, decentralization and human resources in the budget absorption. Results of the study found that the planning, regulation, implementation, decentralization, coordination and human resources do not affect the absorption delay budget. Future studies should broaden the scope of the sample and fix the indicator variables are used primarily for budgeting, planning-related issues.*

**Keywords:** Absorption budget, planning, regulation, coordination, implementation

## PENDAHULUAN

Setiap organisasi baik perusahaan maupun instansi atau lembaga sektor publik dalam menjalankan kegiatannya membutuhkan perencanaan. Perencanaan akan tercermin dari anggaran yang telah dirancang suatu organisasi, baik organisasi swasta atau *sector* publik. Menurut Mardiasmo (2004) anggaran sektor publik adalah suatu rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu *indicator* penting untuk mengetahui kinerja APBN/

APBD adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran.

Permasalahan mengenai realisasi daya serap anggaran yang belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dialami oleh banyak Instansi atau Lembaga Pemerintahan tidak hanya di tingkat pusat namun juga didaerah-daerah di Indonesia. Menurut Siswanto dan Rahayu (2011) dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, belanja K/L telah menghasilkan pola belanja dengan karakteristik penyerapan yang rendah pada semester pertama dan menumpuk pada akhir tahun anggaran. Pola demikian terjadi ditingkat Pusat dan Daerah, sehingga akan mengganggu rencana kebijakan APBN/APBD

terhadap perekonomian secara umum. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementrian/Lembaga telah banyak dilakukan akan tetapi belum memberikan dampak yang signifikan. Permasalahan seperti ini dialami juga oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD-SKPD) yang ada di lingkungan Provinsi NTB. Sebagaimana *statement* Pimpinan Direktorat Jenderal Perbendaharaan NTB “Hj. Alfiah” bahwa realisasi anggaran baik APBN maupun APBD cenderung rendah pada awal tahun dan menumpuk pada akhir tahun sehingga pada akhir tahun anggaran cenderung serapannya rendah (Suara NTB, 22 Desember 2012). Rendahnya kinerja SKPD-SKPD juga dikeluhkan tidak saja oleh Gubernur NTB Dr. TGH.M. Zainul Majdi namun juga pihak legislative (DPRD NTB) selaku mitra eksekutif karena sampai dengan akhir tahun anggaran sebanyak 18 SKPD belum maksimal dalam merealisasikan program-programnya. Daya serap anggaran APBD sejumlah SKPD dilingkup Pemprov NTB hingga menjelang akhir tahun secara kumulatif hanya mencapai 76,92% (Suara NTB, 22 Desember 2012). Kenyataan ini tentunya akan menyebabkan terjadinya inefisiensi penggunaan anggaran. Adanya *gap* antara realisasi dengan target memberikan refleksi bahwa Instansi atau lembaga belum secara efektif dan efisien dalam mengelola anggarannya.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi daya serap anggaran telah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu Sutiono (1997); Bakara (2000); Murtini (2009); Siswanto dan Rahayu (2011) serta Toni (2011). Hasil penelitian Sutiono (1997) menunjukkan bahwa lambannya realisasi daya serap keuangan Program Inpres Dati II di Kabupaten Dati II Bandung dan kabupaten Dati II Bekasi, menunjukkan mekanisme koordinasi antar satuan kerja/dinas yang terkait tidak berjalan sebagaimana mestinya, belum ada pemberian kewenangan (desentralisasi) yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat belum memadai, dan belum tersebar secara merata sesuai kebutuhan daerah. Bakara (2000) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pembangunan di Pemda DKI Jakarta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dimana perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pelaporan satu sama lain saling *pengaruh mempengaruhi*. Sedangkan hasil penelitian Murtini (2009) menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran pada Departemen Perindustrian terdiri dari

pengaruh pagu anggaran, revisi, tanda bintang, kebijakan Depkeu dan Kanwil yang berada di Pulau Jawa dan Luar Jawa, besaran penanganan volume satuan kerja antara Pusat dan Daerah; perbedaan penafsiran kebijakan otonomi daerah; pencapaian target pendirian institusi pendidikan pada setiap provinsi.

Selain itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Siswanto dan Rahayu (2011) yang meneliti tentang faktor-faktor penyebab rendahnya penyerapan belanja Kementrian/Lembaga TA 2010, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 4 permasalahan utama dalam proses penyerapan belanja K/L yaitu terkait dengan persoalan internal K/L, persoalan mekanisme pengadaan barang dan jasa, dokumen pelaksanaan anggaran dan mekanisme revisi dan persoalan lain seperti adanya peningkatan alokasi belanja K/L pada saat terjadi perubahan APBN sebagaimana tertuang dalam APBN-P. Sedangkan Toni (2011) meneliti faktor-faktor penyebab rendahnya daya serap anggaran pada KPPN Bandung. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor penyebab utama rendahnya penyerapan anggaran adalah a) permasalahan pengadaan barang/jasa sebesar 50,35%; b) perencanaan anggaran (21,99%); c) mekanisme pembayaran (20,92%); persiapan pelaksanaan kegiatan (6,38%); d) *force majeure* (0,35%).

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sutiono (1997), Siswanto dan Rahayu (2011) serta Toni (2011), di mana ketiga penelitian tersebut melihat permasalahan rendahnya daya serap anggaran. Namun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu belum melakukan uji pengaruh atas faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan terhadap daya serap anggaran. Sedangkan penelitian ini mencoba menempatkan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai yang mempengaruhi daya serap anggaran pada penelitian sebelumnya yaitu perencanaan, regulasi, pelaksanaan, koordinasi, desentralisasi dan sumber daya manusia dengan menempatkannya sebagai variabel independen. Berdasarkan fenomena maupun penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan objek dan dimensi waktu yang berbeda. Hal ini menjadi landasan akan perlunya kegiatan penelitian mengenai penyerapan anggaran. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah perencanaan, regulasi, pelaksanaan, regulasi, desentralisasi dan sumber daya manusia merupakan faktor-faktor utama yang

berpengaruh terhadap keterlambatan daya serap anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB?

*Grand Theory* yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory* (Donaldson *et al.*, 1991). Teori *stewardship* menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morga, 1996; David, 2006; dan Norton, 2009) dan *non profit* lainnya (Vargas, 2004; Caers Ralf, 2006; dan Wilson 2010) yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dan *principals*.

Proses perencanaan kegiatan dalam penganggaran merupakan salah satu langkah penting dalam pengelolaan anggaran. Sejak dua belas bulan sebelum tahun anggaran dimulai, proses perencanaan, dan penganggaran sudah mulai berjalan. Setiap satuan kerja yang akan mengajukan sebuah kegiatan, harus menyusun *Term of Reference* (TOR) dan rencana Anggaran Biaya (RAB) disertai syarat-syarat pendukung administratif sesuai jenis kegiatan masing-masing. Dari kelengkapan pendukung nilai proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran-Kemestrian/Lembaga (RKA-KL) hingga terbitnya DIPA dimulai. Dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan dan penganggaran selama ini, sering terjadi satuan kerja kurang lengkap atau kurang tepat dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Misalnya, satuan kerja belum tepat dalam memenuhi keselarasan antara tugas dan fungsi, kegiatan, biaya, indikator, komponen dan efisiensi.

Dalam kerangka teori *Stewardship* pihak *principal* dan *agent* memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan organisasi demi mencapai kesuksesan organisasi. *Principal* (pemberi amanah) memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pemegang amanah (*agent*) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya termasuk dalam hal ini *agent* harus melaporkan kepada *principal* mengenai perencanaan atas program dan kegiatan yang telah mereka buat serta melaporkan permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan daya serap anggaran apakah serapan

anggaran telah sesuai dengan program atau kegiatan yang telah direncanakan. Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh perencanaan terhadap daya serap anggaran belum pernah dilakukan sebelumnya. Banyak penelitian terdahulu yang hanya mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya atau terlambatnya daya serap anggaran diantaranya telah dilakukan oleh Siswanto dan Rahayu (2011); Murtini (2009); Toni (2011). Toni (2011) meneliti faktor-faktor penyebab rendahnya daya serap anggaran pada KPPN Bandung, hasilnya menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab utama rendahnya penyerapan anggaran lemahnya perencanaan anggaran (21,99%). Demikian pula pada penelitian Siswanto dan Rahayu (2011) serta Murtini (2009) menunjukkan lemahnya serapan anggaran *dikarenakan adanya karena* lemahnya perencanaan. Bakara (2000) menemukan bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta belum tercapai sesuai yang diharapkan. Utari (2009) dalam studi kualitatifnya meneliti kendala dan hambatan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, hasilnya menunjukkan bahwa (1) struktur SKPD belum memberikan ruang yang cukup bagi penyusunan perencanaan dan penganggaran secara terintegrasi; (2) tim anggaran belum terlibat secara penuh pada setiap tahapan perencanaan; (3) kurangnya pengetahuan, pemahaman dan juga motivasi dari para pegawai untuk menerapkan anggaran kinerja secara optimal.

H<sub>1</sub>. Perencanaan berpengaruh pada daya serap anggaran.

Regulasi adalah seperangkat aturan yang terdiri dari pasal-pasal dan ayat-ayat yang mengatur suatu hal. Salah satu hal yang menjadi hambatan penyerapan anggaran selama ini adalah masalah regulasi. Terdapat dua hal yang sering menjadi hambatan yaitu perijinan terhadap perjanjian kontrak tahun jamak dan regulasi pengadaan tanah dan bangunan. Pada perjanjian kontrak tahun jamak, masalahnya terletak pada perijinan yang panjang yaitu membutuhkan ijin *Mentri* Keuangan. Di satu sisi jika kontrak tahun jamak dapat terlaksana, hal ini sangat membantu penyerapan anggaran. Dengan adanya kontrak tahun jamak, proses pelelangan yang pada umumnya memakan waktu dua bulan dapat dipangkas. Terkait dengan pengadaan tanah dan bangunan, saat ini disyaratkan untuk dilakukan *clearance* oleh Kementerian Negara PAN dan RB, BPKP dan KemenPU. Pada tahun 2011 masih banyak satuan kerja yang belum melengkapi persyaratan tersebut. Dari 422 paket pengadaan oleh 31 K/L, hingga 11 Januari 2012 baru 284 paket yang telah lengkap (Warta Pengawasan, 2012).

Semakin jelas regulasi maka dalam pelaksanaannya akan semakin memudahkan penerima amanah (*steward*) dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada disatuan kerja sehingga diharapkan serapan anggaran untuk suatu program dan kegiatan dapat lebih cepat dilakukan karena terdapat kekuatan hukum atau regulasinya yang jelas sehingga para pelaksana tidak mengalami kebingungan, yang tentunya pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan pemberi amanah harus sejalan dengan visi, misi organisasi dan pemberi amanah (*principal*).

H<sub>2</sub>: Regulasi berpengaruh pada daya serap anggaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa hambatan yang sering terjadi. Salah satu yang umum terjadi pada awal tahun adalah ketentuan yang mengharuskan adanya penyelesaian pertanggung jawaban keuangan tahun sebelumnya, sebelum satuan kerja menerima uang persediaan. Padahal proses penyelesaian itu membutuhkan rekonsiliasi dengan KPPN yang paling cepat dilakukan pada minggu kedua bulan Januari. Selain hal tersebut, penunjukan pejabat pengadaan, ketidaklengkapan dokumen, dan proses verifikasi pada saat melakukan pengeluaran belanja keuangan negara membutuhkan waktu yang tidak sedikit misalnya proses pengumpulan bukti-bukti pendukung kegiatan sebagai bahan pengajuan pembayaran terkadang membutuhkan waktu hingga beberapa bulan (Warta Pengawasan, 2012). Tentunya semua permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan akan mempengaruhi daya serap anggaran, yang diprediksi menjadi semakin lambat sehingga hal ini akan mempengaruhi satker sebagai penerima amanah (*steward*) dari pemberi amanah (*principal*). Jika permasalahan dapat diminimalisir maka *steward* dapat menjalankan tupoksinya sejalan dengan tujuan organisasi dan seperti yang diinginkan *principal*.

H<sub>3</sub>: Pelaksanaan berpengaruh pada daya serap anggaran.

Koordinasi yang baik di semua tingkatan pada semua instansi/dinas dan satuan pelaksana yang terkait, maka akan terhindar dari adanya tumpang tindih atau *over lapping*. J.B Kristiasi (1994) dalam Sutiono (1997) memberikan pengertian “koordinasi sebagai penyesuaian dan pengaturan yang baik, sehingga mengkoordinasikan berarti menyesuaikan dan mengatur baik-baik”. Kegiatan koordinasi meliputi koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam kegiatan pengawasan (Warta Pengawasan, 2012).

Semakin baik koordinasi dalam implementasinya akan semakin memudahkan pemegang amanah

(*steward*) dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada disatuan kerja sehingga diharapkan serapan anggaran untuk suatu program dan kegiatan dapat lebih cepat dilakukan, yang tentunya pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan pemberi amanah harus sejalan dengan visi, misi organisasi dan pemberi amanah (*principal*). Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh koordinasi terhadap daya serap anggaran belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan Sutiono (1997) menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi lambannya realisasi daya serap keuangan Program Inpres Dati II, salah satunya disebabkan karena mekanisme koordinasi antar satuan kerja/Dinas yang terkait tidak berjalan sebagaimana mestinya.

H<sub>4</sub>: Koordinasi berpengaruh pada daya serap anggaran.

Besar dan kecilnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah akan berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan. Semakin banyak campur tangan dari pemerintah pusat maka justru akan membingungkan. Sebab mungkin saja skala prioritas dan persyaratan-persyaratan administratif lainnya yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi dan karakteristik yang ada di daerah, sehingga pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesegera mungkin (Warta Pengawasan, 2012). Pendelegasian yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah akan sangat membantu daerah dalam melaksanakan kegiatannya karena merekalah yang mengerti daerahnya sendiri, demikian pula pemerintah daerah terhadap satker-satkernya. Penerima amanah (*steward*) berdasarkan pendelegasian dari pemberi amanah (*principal*) dapat bekerja dengan baik karena diberikan kesempatan untuk mengadakan program dan kegiatan sesuai dengan kondisi satkernya masing-masing sehingga diharapkan serapan anggaran dapat berjalan sesuai yang diinginkan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Sutiono (1997) menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi lambannya realisasi daya serap keuangan, salah satunya disebabkan karena belum ada pemberian wewenang (desentralisasi) yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.

H<sub>5</sub>: Desentralisasi berpengaruh pada daya serap anggaran.

Peningkatan mutu sumber daya manusia harus mendapatkan sentuhan-sentuhan tersendiri agar kinerja organisasi dapat ditingkatkan. Pengembangan tersebut meliputi sistem pendidikan dan pelatihan, sistem karir, dan lain-lain strategi. Tetapi yang paling

mendasar dari upaya peningkatan mutu SDM adalah pada sistem pengadaan pegawai itu sendiri (Sugiono, 1997).

Semakin baik kualitas sumber daya manusia suatu satker sebagai penerima amanah (*steward*) dalam menjalankan program dan kegiatan dari pemberi amanah (*principal*) maka serapan anggarannya akan semakin baik karena SDM-nya sudah mengerti akan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi). Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh desentralisasi terhadap daya serap anggaran belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dilakukan Sutiono (1997) menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi lambannya realisasi daya serap keuangan, salah satunya disebabkan karena kualitas SDM yang terlibat belum memadai, dan belum tersebar secara merata sesuai kebutuhan daerah. Utari (2009) dalam studi menemukan bahwa kurangnya pengetahuan, pemahaman dan juga motivasi dari para pegawai untuk menerapkan anggaran kinerja secara optimal. H6: SDM berpengaruh pada daya serap anggaran.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei (*survey research*) yang berupa penjelasan dan pengujian hipotesis (*explanatory*) yang menggunakan metode deskriptif dan eksploratori. Penelitian ini dilaksanakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD-SKPD) yang ada di Pemprov. NTB. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *non probability sampling (purposive sampling)*. Kriteria sampel adalah 1) Aparatur yang terlibat di dalam proses penyusunan anggaran seperti kepala dinas, kepala sub bagian keuangan, kepala sub bagian perencanaan, kepala sub bagian umum dan kepegawaian serta kepala bidang dari masing-masing dinas atau SKPD; 2) Aparatur yang terlibat didalam proses penatausahaan; 3) Pertimbangan mengambil sampel tersebut karena sampel adalah aparatur yang paling memahami semua permasalahan terkait dengan daya serap anggaran. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan survei. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder.

Prosedur analisis data terdiri dari uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji hipotesis. Uji hipotesis yang dilakukan terdiri dari uji asumsi klasik (normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, multikolinearitas). Langkah berikutnya menggunakan analisis regresi linier berganda (*multivariate linier regrestion*) dengan persamaan matematis.

$$DSA = a + b_1P + b_2R + b_3K + b_4PLK + b_5D + b_6SDM + e \dots 1)$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian ini pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov NTB menggunakan kuesioner. Uji validitas diukur dengan menggunakan korelasi *pearson product moment*. Uji reabilitas dilakukan dengan metode *Internal consistency*. Reliabilitas instrument penelitian dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan koefisien *cronbach's Alpha*. Jika nilai koefisien Alpha lebih besar dari 0,5 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal atau reliabel.

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean), dan nilai standar deviasi. Berdasarkan analisis statistik deskriptif diperoleh gambaran sampel pada Tabel 1.

Tabel 1 memberikan gambaran mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian, jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi *el* masing-masing variabel. Uji asumsi klasik bertujuan untuk menghilangkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam analisis regresi sehingga hasil yang akan diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataan. Uji asumsi klasik yang dilakukan dengan uji Normalitas, Multikolinearitas dan Heteroskedastisitas.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki data normal atau mendekati normal. Untuk mengujinya dapat dilakukan dengan grafik dan melihat besaran *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil penelitian tentang apakah residual terdistribusi normal atau tidak, terlihat pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2 hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov di atas 0,05 dan tidak signifikan pada 0,05. Nilai  $p = 0,105 >$  dari 0,05, dengan nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 1.251, maka residual terdistribusi secara normal.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik harus bebas dari masalah multikolinearitas. Hasil pendeteksian adanya multikolinearitas dapat diketahui pada Tabel 3.

**Tabel 1.**



*Sumber : SPSS, 2015*

**Tabel 2.**



*Sumber : SPSS, 2015*

**Tabel 3.**  
**Uji Multikolinearitas**

Variabel	Collinearity Statistics
	VIF
TDIPA perenc	3.149
Tregulasi	3.452
Tkoordinasi	2.577
Tpelaksanaan	4.323
Tdesentralisasi	1.418
Tsumber daya manusia	1.992
TDSA (Y)	

*Sumber : SPSS, 2015*

Berdasarkan data Tabel 3, hasil perhitungan *variance inflation factor* (VIF) menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel *independent* yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini, tidak terjadi gejala multikolonieritas antar variabel *independentnya*.

Uji Heteroskedastisitas terlihat pada Tabel 4 di mana koefisien parameter untuk masing-masing variabel independen terhadap residual masing-masing persamaan tidak ada yang signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas.

Berdasarkan analisis regresi berganda pada Tabel 5. Hipotesis pertama menyatakan perencanaan berpengaruh terhadap daya serap anggaran. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5 diperoleh nilai *t-test* sebesar 1.684 dengan tingkat signifikansi

sebesar 0.098 (5%), yang berarti perencanaan tidak berpengaruh terhadap daya serap anggaran, sehingga menolak hipotesis yang telah diajukan sebelumnya.

Jika dilihat dari Tabel data jawaban responden adalah rata-rata responden menjawab pada skala 3.8 untuk variabel perencanaan (X1) yang memiliki arti bahwa satker kurang sering menghadapi permasalahan terkait dengan DIPA; POK. Sedangkan untuk variabel daya serap anggaran (Y) rata-rata responden menjawab pada skala 3.4 yang berarti serapan anggaran satker sampe dengan akhir tahun berkisar pada 50% keatas kurang dari 80%. Seharusnya jika perencanaan terorganisir dengan baik seharusnya realisasi atau eksekusi anggaran dapat tercapai sampai nilai maksimal. Namun ternyata dalam aplikasinya serapan anggaran tidak ada yang sampai 80% keatas atau mencapai 100%.

**Tabel 4.**  
**Uji Heteroskedastisitas**

Sumber : SPSS, 2015

**Tabel 5.**  
**Uji Regresi**

Variabel Independen	Persamaan model		
	Beta	T	Sig.
TDIPA perenc	0.393	1.684	0.098
Tregulasi	-0.024	-0.097	0.923
Tkoordinasi	-0.067	-0.319	0.751
Tpelaksanaan	-0.091	-0.332	0.741
Tdesentralisasi	0.037	0.234	0.816
Tsumber daya manusia	-0.165	-0.888	0.379

Tdaya serap Anggaran (Y)-

R square = 0.100  
Adjusted R Square = -0.004  
F hitung persamaan regresi = 0.965 (sig = 0.458)

Sumber : SPSS, 2015

Sehingga kemungkinan masih terdapat permasalahan teknis baik pada perencanaan maupun dalam eksekusi anggaran. Hal inilah yang dapat menjadi penyebab ketidaksignifikanan pada pengujian hipotesis ini.

Permasalahan lemahnya perencanaan sehingga mempengaruhi anggaran telah banyak diidentifikasi pada penelitian terdahulu dimana diantaranya telah dilakukan oleh Siswanto dan Rahayu (2011); Murtini (2009); Toni (2011). Toni (2011) menemukan bahwa salah satu faktor-faktor penyebab rendahnya daya serap anggaran pada KPPN Bandung, adalah lemahnya perencanaan anggaran (21,99%). Demikian pula pada penelitian Siswanto dan Rahayu (2011) serta Murtini (2009) menunjukkan lemahnya serapan anggaran dikarenakan karena lemahnya perencanaan. Bakara (2000) menemukan bahwa perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta belum tercapai sesuai yang diharapkan. Utari (2009) dalam studi kualitatifnya meneliti kendala dan hambatan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, hasilnya menunjukkan bahwa (1) struktur SKPD belum memberikan ruang yang cukup bagi penyusunan perencanaan dan penganggaran secara terintegrasi; (2) tim anggaran belum terlibat secara penuh pada setiap tahapan perencanaan; (3) kurangnya pengetahuan, pemahaman dan juga motivasi dari para pegawai untuk menerapkan anggaran kinerja secara optimal.

Dalam kerangka teori *Stewardship* pihak *principal* dan *agent* memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan organisasi demi mencapai kesuksesan organisasi. *Principal* (pemberi amanah) memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pemegang amanah (*agent*) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya termasuk dalam hal ini *agent* harus melaporkan kepada *principal* mengenai perencanaan atas program dan kegiatan yang telah mereka buat serta melaporkan permasalahan-permasalahan yang muncul terkait dengan daya serap anggaran apakah serapan anggaran telah sesuai dengan program atau kegiatan yang telah direncanakan.

Hipotesis kedua menyatakan regulasi berpengaruh terhadap daya serap anggaran. Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5 diperoleh nilai *t-test* sebesar -0.097 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.923 (di atas 5%), yang berarti regulasi tidak berpengaruh terhadap daya serap anggaran sehingga menolak hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Selain itu tanda hasil penelitian adalah negatif. Hasil penelitian ini menentang asumsi logika berpikir yang

diajukan bahwa semakin jelas regulasi maka dalam pelaksanaannya akan semakin memudahkan pemegang amanah (*steward*) dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada disatukan kerja sehingga diharapkan serapan anggaran untuk suatu program dan kegiatan dapat lebih cepat dilakukan karena terdapat kekuatan hukum atau regulasinya yang jelas sehingga para pelaksana tidak mengalami kebingungan, yang tentunya pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan pemberi amanah harus sejalan dengan visi, misi organisasi dan pemberi amanah (*principal*).

Jika dilihat dari hasil jawaban responden diketahui bahwa untuk variabel regulasi rata-rata responden menjawab pada skala 3,8 yang berarti bahwa satker kurang sering mengalami permasalahan tentang regulasi, dimana regulasi dirasa cukup jelas sehingga memudahkan didalam pelaksanaannya. Sedangkan jawaban responden untuk variabel daya serap anggaran rata-rata responden menjawab pada skala 3,4 yang berarti serapan anggaran sekitar 50% keatas. Jika dilihat dari jawaban responden kemungkinan alasan ketidaksignifikanan adalah karena satker terlalu berhati-hati atau terkesan takut untuk mengeksekusi program dan kegiatan walaupun regulasi telah jelas. Kehati-hatian atau ketakutan disebabkan banyaknya kasus korupsi yang terbawa sampai ke ranah hukum sehingga tentunya memperlambat realisasi daya serap anggaran.

Hipotesis ketiga menyatakan pelaksanaan berpengaruh terhadap daya serap anggaran. Hasil pengujian pada Tabel 5 diperoleh nilai *t-test* sebesar -0.332 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.741 (di atas 5%), tentunya menolak hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Jika dilihat dari Tabel jawaban responden diketahui bahwa untuk variabel pelaksanaan rata-rata responden menjawab pada skala 3,9 yang artinya satker kurang sering mengalami permasalahan didalam pelaksanaan program atau kegiatan. Sedangkan jawaban responden untuk variabel daya serap anggaran rata-rata responden menjawab pada skala 3,4 yang berarti serapan anggaran sekitar 50% ke atas. Jika dilihat dari jawaban responden kemungkinan alasan ketidaksignifikanan adalah walaupun satker kurang sering menghadapi permasalahan namun masih ada jawaban responden yang menjawab bahwa satker mengalami hambatan-hambatan seperti adanya penyelesaian pertanggungjawaban keuangan tahun sebelumnya, sebelum satuan kerja menerima uang persediaan. Padahal proses penyelesaian itu membutuhkan rekonsiliasi dengan KPPN yang

paling cepat dilakukan pada minggu kedua bulan Januari. Selain hal tersebut, penunjukan pejabat pengadaan, ketidaklengkapan dokumen, dan proses verifikasi pada saat melakukan pengeluaran belanja keuangan negara membutuhkan waktu yang tidak sedikit misalnya proses pengumpulan bukti-bukti pendukung kegiatan sebagai bahan pengajuan pembayaran terkadang membutuhkan waktu hingga beberapa bulan. Sehingga permasalahan pelaksanaan mempengaruhi serapan anggaran yang tidak mencapai 100% pada akhir tahun.

Hipotesis keempat menyatakan desentralisasi berpengaruh terhadap daya serap anggaran. Hasil pengujian pada Tabel 5 diperoleh nilai *t-test* sebesar 0.037 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.234 (di atas 5%) menolak hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Penelitian ini tidak mendukung penelitian Sutiono (1997) yang menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi lambannya realisasi daya serap keuangan, salah satunya disebabkan karena belum ada pemberian wewenang (desentralisasi) yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah Tingkat II. Ditolaknya hipotesis kemungkinan karena masih banyaknya campur tangan pemerintah pusat dalam program dan kegiatan satker di daerah. Sebab mungkin saja skala prioritas dan persyaratan-persyaratan administratif lainnya yang ditetapkan tidak sesuai dengan kondisi dan karakteristik yang ada di daerah, sehingga pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesegera mungkin. Selain itu adanya pemangkasan anggaran oleh pusat yang tidak sesuai dengan kebutuhan satker pada saat proses pengajuan sampai persetujuan anggaran sehingga banyak kegiatan yang telah direncanakan oleh satker tidak dapat terlaksana sehingga mempengaruhi daya serap anggaran mereka. Secara teori Pendelegasian yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah akan sangat membantu daerah dalam melaksanakan kegiatannya karena merekalah yang mengerti daerahnya sendiri, demikian pula pemerintah daerah terhadap satker-satkernya. Penerima amanah (*steward*) berdasarkan pendelegasian dari pemberi amanah (*principal*) dapat bekerja dengan baik karena diberikan kesempatan untuk mengadakan program dan kegiatan sesuai dengan kondisi satkernya masing-masing sehingga diharapkan serapan anggaran dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Dalam kerangka teori *stewardship* pemberi amanah (pemerintah daerah) dan penerima amanah (Satker) berjalan pada satu visi dan misi sama demi kesuksesan organisasi.

Hipotesis kelima menyatakan koordinasi berpengaruh terhadap daya serap anggaran. Hasil

pengujian pada Tabel 5 diperoleh nilai *t-test* sebesar -0.319 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.751 (di atas 5%) sehingga menolak hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Jika dilihat dari hasil data responden diketahui bahwa rata-rata responden menjawab pada skala 4 untuk variabel koordinasi ini berarti bahwa satker kurang sering menghadapi permasalahan koordinasi baik dengan pihak internal maupun eksternal, namun serapan anggaran sampai akhir tahun hanya berkisar 50%-80%. Ketidaksignifikanan bisa disebabkan karena masih ada kurangnya koordinasi antara bagian perencanaan dan bagian keuangan terkait dengan anggaran sehingga karena kurangnya koordinasi menyebabkan satker mengalami revisi anggaran beberapa kali ditahun berjalan sehingga menyebabkan tertundanya pelaksanaan program atau kegiatan yang mempengaruhi serapan anggaran sehingga menjadi rendah.

Secara teori, dengan koordinasi yang baik di semua tingkatan pada semua instansi atau dinas dan satuan pelaksana yang terkait, maka akan terhindar dari adanya tumpang tindih atau *over lapping*. Kegiatan koordinasi meliputi koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam kegiatan pengawasan (Warta Pengawasan, 2012). Semakin baik koordinasi dalam implementasinya akan semakin memudahkan pemegang amanah (*steward*) dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada disatukan kerja sehingga diharapkan serapan anggaran untuk suatu program dan kegiatan dapat lebih cepat dilakukan, yang tentunya pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan pemberi amanah harus sejalan dengan visi, misi organisasi dan pemberi amanah (*principal*). Penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan Sutiono (1997) yang menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi lambannya realisasi daya serap keuangan Program Inpres Dati II, salah satunya disebabkan karena mekanisme koordinasi antar satuan kerja atau dinas yang terkait karena tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Hipotesis keenam menyatakan sumber daya manusia berpengaruh terhadap daya serap anggaran. Hasil pengujian pada Tabel 5 diperoleh nilai *t-test* sebesar -0.165 dengan tingkat signifikansi sebesar -0.888 (di atas 5%) menolak hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Jika dilihat dari jawaban responden terhadap variabel SDM rata-rata responden menjawab pada skala 3 sehingga kemungkinan alasan ketidaksignifikan ini disebabkan karena masih banyak SDM di satker yang kurang

mengikuti pelatihan, kurangnya pelaksana pengadaan yang bersertifikat, masih seringnya terjadi perangkapan tugas, keengganan untuk menjadi pejabat. Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya mempengaruhi daya serap anggaran yang mana dari jawaban responden rata-rata serapan anggaran berkisar 50% -80% diakhir tahun. Jika SDM kurang kompeten maka serapan anggarannya kemungkinan dapat menjadi rendah. Berdasarkan teori semakin baik kualitas sumber daya manusia suatu satker sebagai penerima amanah (*steward*) dalam menjalankan program dan kegiatan dari pemberi amanah (*principal*) maka serapan anggarannya akan semakin baik karena SDM-nya sudah mengerti akan tugas pokok dan fungsinya Tupoksi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sutiono (1997) yang menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi lambannya realisasi daya serap keuangan, salah satunya disebabkan karena kualitas SDM yang terlibat belum memadai, dan belum tersebar secara merata sesuai kebutuhan daerah. Utari (2009) menemukan bahwa kurangnya pengetahuan, pemahaman dan juga motivasi dari para pegawai untuk menerapkan anggaran kinerja secara optimal

## SIMPULAN

Penelitian ini mencoba menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keterlambatan daya serap anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan, regulasi, pelaksanaan, desentralisasi, koordinasi dan sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keterlambatan daya serap anggaran. Terlepas dari hasil temuan tersebut, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya sampel yang digunakan adalah pegawai negeri sipil (PNS) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov NTB dengan kriteria yaitu 1) Aparatur yang terlibat didalam proses penyusunan anggaran seperti kepala dinas, kepala sub bagian keuangan, kepala sub bagian perencanaan, kepala sub bagian umum dan kepegawaian serta kepala bidang dari masing-masing dinas atau SKPD; 2) Aparatur yang terlibat didalam proses penatausahaan. Disarankan penelitian selanjutnya menggunakan sampel yang lebih luas agar dapat memberikan hasil

yang lebih baik. Selain itu, beberapa keterbatasan lain yang melekat dalam penelitian ini berhubungan dengan pengukuran indikator variabel yang digunakan dalam penelitian. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan atau memperbaiki pengukuran atau indikator dalam variabel perencanaan terutama untuk masalah penganggaran dan DIPA untuk penelitian selanjutnya.

## REFERENSI

- Bastian, I. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu pengantar. Penerbit Erlangga Yogyakarta.
- Bakara F.S. 2000. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pembangunan Pemda DKI Jakarta. Tesis. Universitas Indonesia.
- Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit YKPN Yogyakarta.
- Muhlis. 2009. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Moderator (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Barri Sul-sel).
- Murtini. 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Penyerapan Realisasi Anggaran Departemen Perindustrian Republik Indonesia. Tesis. Universitas Bina Nusantara.
- Nordiawan. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Salemba Universitas Indonesia.
- Sekaran, U. 2003. Metode Penelitian Bisnis. Penerbit: Salemba Empat Jakarta.
- Siswanto D.A dan Rahayu L.S. 2011. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementrian/Lembaga TA 2010.
- Suripto. 1997. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lambannya Daya Serap Keuangan program Inpres Dati II (Kajian Tentang Pelaksanaan Program Inpres Dati II di Kabupaten Dati II Bandung dan Kabupaten Dati II Bekasi). Tesis. Universitas Indonesia.
- Suyanto B dan Sutinah. 2006. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: Kencana
- Toni. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Daya Serap Anggaran Pada KPPN Bandung.
- Ward dan Peppard. 2002. *Strategic Planning for Information Systems*.
- Warta Pengawasan, Vol.XIX/No.1/Maret 2012.